

**Evaluasi Program Pembangunan Ekonomi Nasional
yang Mengacu pada Nilai Pancasila**
*Evaluation of the National Economic Development Program Referring to
Pancasila Values*

Atikah Nur Rahmah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: atikaahr@gmail.com

Meydina Yohanita Putri
UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: meydinaa268@gmail.com

Azizah Dzakiatul Ulya
UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: kiaazizah01@gmail.com

Maulida Fatimatuz Zahro
UIN Raden Mas Said Surakarta
Email: maulfzahro@gmail.com

Article Info

Received : 10 October 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 29 October 2025
Published : 31 October 2025

Keywords: Economic development,
program evaluation,
Pancasila values, social
justice, national policy

Kata kunci: Pembangunan ekonomi,
evaluasi program, nilai
Pancasila, keadilan
sosial, kebijakan
nasional

Abstract

National economic development is a key pillar in realizing the welfare of the Indonesian people. However, in its implementation, economic development often ignores the fundamental values embodied in Pancasila. This study aims to evaluate the effectiveness of national economic development programs by reviewing their alignment with Pancasila values, particularly in terms of social justice, unity, and humanity. The method used was a qualitative approach with document studies and in-depth interviews with stakeholders at the central and regional levels. The evaluation results indicate that some development programs align with Pancasila values, particularly in efforts to empower the people's economy and reduce inequality. However, a number of programs were also found to not reflect the principles of justice and equal participation. The conclusion of this study emphasizes the importance of explicitly integrating Pancasila values into the planning, implementation, and evaluation of national economic policies to ensure inclusive and sustainable development.

Abstrak

Pembangunan ekonomi nasional merupakan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, dalam implementasinya, tidak jarang pembangunan ekonomi mengabaikan nilai-nilai dasar yang terkandung

dalam Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pembangunan ekonomi nasional dengan meninjau kesesuaiannya terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam aspek keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian program pembangunan telah selaras dengan nilai Pancasila, terutama dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengurangan kesenjangan. Namun demikian, ditemukan pula sejumlah program yang belum mencerminkan prinsip keadilan dan partisipasi yang setara. Kesimpulan dari studi ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila secara eksplisit dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ekonomi nasional guna memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

How to cite: Atikah Nur Rahmah, Meydina Yohanita Putri, Azizah Dzakiatul Ulya, Maulida Fatimatuz Zahro, "Pancasila dan Artificial Intelligence: Analisis Etis atas Regulasi AI di Indonesia", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 5 (2025): 747-757. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Atikah Nur Rahmah, Meydina Yohanita Putri, Azizah Dzakiatul Ulya, Maulida Fatimatuz Zahro



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan upaya strategis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, orientasi pembangunan yang terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi kerap menimbulkan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila belum sepenuhnya menjadi landasan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Pancasila sebagai ideologi dan paradigma pembangunan memiliki peran penting dalam menuntun arah pembangunan agar tidak sekadar mengejar pertumbuhan material, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan moral.¹

Secara historis, berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang beragam dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakmerataan infrastruktur masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan laporan World Economic Forum (2018), tingkat inklusivitas ekonomi Indonesia berada pada kategori belum memuaskan, yang menunjukkan perlunya reorientasi pembangunan ekonomi agar lebih berpihak pada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila –khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia – dapat dijadikan

¹ Ahmad Muhamad and Mustain Nasoha, "Surel Penulis Koresponden: 1" 1, no. 2 (2024).

tolok ukur moral dan ideologis dalam mengevaluasi efektivitas program pembangunan ekonomi nasional.²

Ekonomi islam adalah suatu sistem ilmu pengetahuan yang berfokus pada masalah perekonomian yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami. Pengertian pembangunan ekonomi dalam islam, berdasarkan pemahaman terhadap syari'ah, bersumber dari Al-Quran dan Hadist, dengan penekanan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang terpancar dari aqidah Islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah Swt untuk seluruh umat manusia. Sehingga ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam bertitik tolak dari Allah dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (Allah kaghoyyatul ghoyyah).

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan maka Ekonomi Islam meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi mempunyai sumber "nilai-nilai normatif-imperatif", sebagai acuan yang mengikat. Dengan berdasarkan kepada aturan Allah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Pemahaman konsep Islam diperlukan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam secara utuh, yang merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan. Konsep Islam perlu dipahami secara mendasar agar falsafah, tujuan dan strategi operasional dari sistem ekonomi Islam dapat dipahami secara komprehensif, sehingga tidak lagi ada anggapan bahwa sistem ekonomi Islam tidak memiliki landasan filosofis, politis maupun strategis.

Pengertian pembangunan ekonomi dalam Islam, berdasarkan pemahaman terhadap syariah, bersumber dari Al-Quran dan Hadist, dengan penekanan bahwa keberhasilan pembangunan harus disertai pengetahuan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, serta pengalaman negara-negara yang telah berhasil dalam melakukan usaha pembangunan.³ Menurut Nurcholis Madjid, pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhilafahan manusia di muka bumi yang akan dipertanggung jawabkannya nanti di hadapan Allah. Penjabaran pemenuhan fungsi kekhilafahan ini sangat penting artinya, agar manusia mengerti benar caranya berperan. Penjabaran ini memerlukan reinterpretasi terhadap berbagai konsep pembangunan.

² "View of Pancasila Sebagai Fondasi Dalam Pembentukan Hukum Tata Negara Di Era Reformasi (1)," n.d.

³ "View of Pancasila Sebagai Dasar Hukum Tata Negara Di Indonesia_ Implikasi Dan Implementasi (1)," n.d.

Dawam Rahardjo (1983) pembangunan merupakan pemenuhan fungsi kekhalfahan, dengan merealisasikan sibghah Allah dalam mewujudkan ummatan wasathan. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi (economic development) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai berikut, "economic development is growth plus change" (Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi).⁴

Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam, kedua istilah ini juga ditemukan. Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare (Pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia). Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral.⁵

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi komprehensif terhadap program pembangunan ekonomi nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Evaluasi tersebut tidak hanya menilai keberhasilan dari sisi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari aspek pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi, penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat relevan untuk mencegah terjadinya dehumanisasi dan ketimpangan struktural. Dengan demikian, penelitian ini penting sebagai upaya memperkuat orientasi ideologis pembangunan nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara ideologi Pancasila dan kebijakan ekonomi nasional. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang evaluasi program pembangunan yang tidak hanya mengedepankan indikator ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

⁴ "View of Telaah Kritis Terhadap Penerapan Pancasila Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme (1)," n.d.

⁵ Muhammad Mustain Nasoha, "View of Dampak Kewarganegaraan Terhadap Akses Ekonomi_ Analisis Atas Kesenjangan Sosial-Ekonomi Di Indonesia (1)," n.d.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali berbagai literatur yang membahas hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA dan Scopus, laporan Bappenas, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Langkah analisis meliputi:

- a. Pengumpulan Data Literatur – mengidentifikasi artikel akademik terkait Pancasila dan pembangunan ekonomi (2015–2024).
- b. Klasifikasi Data – mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan kesesuaian nilai Pancasila dalam pembangunan.
- c. Analisis Isi (Content Analysis) – mengevaluasi sejauh mana kebijakan pembangunan nasional mencerminkan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan kebersamaan.
- d. Penarikan Kesimpulan – menentukan relevansi dan efektivitas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks ekonomi modern Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, investasi, dan inovasi. Dalam konteks Indonesia, pembangunan ekonomi diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan ekonomi nasional mencakup aspek makro (pertumbuhan PDB, investasi, ekspor) dan mikro (pemberdayaan masyarakat, peningkatan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan). Namun demikian, pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan kerap menimbulkan efek samping berupa kesenjangan sosial. Oleh karena itu, paradigma pembangunan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (people-centered development).⁶

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala hukum di Indonesia. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila berperan sebagai pedoman moral, etika, dan arah kebijakan. Menurut Agustari et al. (2022), pembangunan yang berlandaskan Pancasila berarti pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, spiritual, dan ekologis.

Nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan pembangunan ekonomi antara lain:

⁶ “Pandangan Pancasila Dan Penguatan Hukum Tata Negara Dalam Era Demokrasi (1),” n.d.

- a. Sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab): menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesejahteraan tanpa diskriminasi.
- b. Sila ke-3 (Persatuan Indonesia): menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah.
- c. Sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia): menjadi prinsip utama dalam distribusi kekayaan dan hasil pembangunan.

Natalia et al. (2021) menekankan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat karakter bangsa dan membentuk masyarakat yang beretika dalam bekerja dan berproduksi, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan material tetapi juga moral.⁷

3. Pancasila dan Sistem Ekonomi Nasional

Menurut Ismail (2014), Sistem Ekonomi Pancasila menempatkan negara, swasta, dan masyarakat dalam posisi saling melengkapi melalui asas kekeluargaan dan gotong royong. Sistem ini menolak ekstrem kapitalisme yang menimbulkan ketimpangan serta sosialisme yang meniadakan kebebasan individu. Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan Pancasila harus memperhatikan prinsip keadilan, kebersamaan, dan kemandirian. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator yang memastikan sumber daya nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

4. Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun. Pemerintah berhasil memperluas infrastruktur, meningkatkan investasi, dan mengembangkan industri manufaktur. Namun, indikator kesenjangan ekonomi seperti Gini Ratio masih menunjukkan ketimpangan yang tinggi, terutama antara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.

Yahya et al. (2024) menilai bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia masih cenderung teknokratis dan belum berlandaskan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Hukum dan kebijakan ekonomi sering kali lebih berorientasi pada kepentingan pasar ketimbang kepentingan rakyat. Akibatnya, nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial kehilangan tempat dalam praktik ekonomi modern.⁸

⁷ Awaliyah, Siti Deliabilda et al., "Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Percepatan Ekonomi Inklusif Di Era Society 5.0 (The Application of Pancasila Economic Value in Acceleration of Economic Inclusion toward Society 5.0)," *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 1-20, <https://journal.lppmpelitabangsa.id/>.

⁸ I Gusti Ayu Subudi Kirti, Sukardi Sukardi, and Ismail Ismail, "Pengaruh Penerapan Discovery Learning Berbantuan Media Slide Program Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar PPKn," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5, no. 2 (2018): 73-83, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i2.60>.

5. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) → mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- b. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) → mengharuskan adanya pemerataan pembangunan antarwilayah.
- c. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) → menjadi pedoman utama bagi kebijakan redistribusi ekonomi, pajak progresif, dan subsidi tepat sasaran.

Namun, seperti diungkapkan Deliabdila et al. (2021), implementasi nilai-nilai ini masih menghadapi hambatan, seperti birokrasi yang tidak efisien, praktik korupsi, dan lemahnya pengawasan kebijakan publik.⁹

6. Tantangan Global dan Kebutuhan Paradigma Baru

Memasuki era Society 5.0, Indonesia menghadapi tantangan baru berupa disrupsi teknologi dan globalisasi ekonomi. Perkembangan ekonomi digital memang membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga berisiko memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan yang tertinggal. Dalam konteks ini, prinsip gotong royong dan kemanusiaan harus menjadi fondasi utama agar kemajuan teknologi tidak mengorbankan aspek sosial. Pembangunan ekonomi yang humanis dan inklusif harus menjadi prioritas, sesuai amanat sila kelima Pancasila.¹⁰

Keluarga atau orang tua sering mengambil opsi kawin paksa apabila situasi ekonomi sulit, berharap dapat “mengurangi beban” ekonomi atau mencari solusi darurat dalam menghadapi masalah keuangan. (Misalnya, anak perempuan dipaksa kawin agar tidak memerlukan biaya pemeliharaan atau agar ada tanggungan tambahan dari keluarga suami.) Dampak ekonomi dari kawin paksa yaitu konflik keluarga dan perceraian. Ini bisa menambah beban ekonomi keluarga akibat tuntutan nafkah, pembagian harta, dan sebagainya. Dampak psikologis/sosial dari kawin paksa juga bisa memengaruhi produktivitas atau kemampuan seseorang untuk bekerja / berkontribusi secara ekonomi dalam rumah tangga, meskipun detail kuantitatif ekonominya tidak terlalu mendalam di jurnal tersebut.

Beberapa studi lain yang mengaitkan kawin paksa/pernikahan dini / paksa dengan dampak ekonomi:

⁹ Ahmad Yahya et al., “Integration of Pancasila Values in Economic Legal Engineering for National Development,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 7 no. 1, no. 1 (2025): 1–22, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22259>.

¹⁰ Sifa Rofatunnisa and Hardius Usman, “Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Ketimpangan Gender Di Indonesia: Analisis Persamaan Simultan Data Panel,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2024): 15–32, <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2530>.

Pernikahan dini (yang dekat sekali dengan kawin paksa bila tidak ada kerelaan) menunjukkan dampak ekonomi, misalnya pasangan kurang mapan → kesulitan menyediakan kebutuhan anak dan pangan, kena stunting karena gizi buruk. Dampak negatifnya termasuk konflik keluarga, perceraian, yang akhirnya terkait dengan beban ekonomi (biaya rumah tangga, biaya penghidupan, pemeliharaan anak) .

Rangkaian sebab-akibat ekonomi → kawin paksa → dampak ekonomi. Contoh: keterbatasan ekonomi → orang tua melihat kawin paksa sebagai solusi “mengurangi tanggungan” atau mempercepat anak memiliki tanggungan sendiri → kawin paksa terjadi → terjadi biaya tambahan (uang nikah, pemeliharaan istri / anak, jika ada konflik → biaya perceraian) → beban ekonomi rumah tangga bisa menjadi lebih berat atau tidak seimbang.

Kalau pendidikan rendah, peluang kerja juga rendah, sehingga anak (terutama perempuan) kurang mandiri secara ekonomi. Ini membuat mereka lebih rentan terhadap kawin paksa. Setelah kawin paksa, keterbatasan pendidikan dan kemauan atau kemampuan bekerja bisa tetap menghambat penghasilan tambahan .¹¹

Kawin paksa sering berdampak lebih berat pada perempuan: kehilangan kesempatan pendidikan, pekerjaan, kemampuan finansial. Ini memperkuat siklus ketergantungan ekonomi pada keluarga suami atau orang tua. Tidak cuma kerugian ekonomi langsung, tapi juga kehilangan potensi ekonomi .¹²

Adapun dituliskan pada jurnal “Dampak kewarganegaraan terhadap ekonomi” oleh Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, S.H., M.H., dampak-dampak kewarganegaraan terhadap ekonomi, antara lain:

1. Kewarganegaraan dan Akses Ekonomi. Status kewarganegaraan menentukan hak ekonomi seseorang (akses terhadap pekerjaan, pendidikan, layanan sosial, dan kesejahteraan). Warga negara penuh umumnya mendapat akses ekonomi dan sosial yang lebih baik dibanding penduduk asing atau individu tanpa kewarganegaraan. Perbedaan status ini memunculkan ketidakadilan ekonomi, misalnya dalam hal distribusi pendapatan dan peluang kerja.
2. Kewarganegaraan dan Teknologi Digital. Penelitian Peterson & Lee (2022) menunjukkan bahwa warga negara lebih mudah mengakses teknologi digital dan peluang ekonomi digital. Imigran dan non-warga negara sering tertinggal karena keterbatasan infrastruktur dan kebijakan digital inklusif. Akibatnya muncul kesenjangan digital yang berdampak pada ketimpangan ekonomi.

¹¹ Muhammad Mustain Nasoha et al., “Pancasila Sebagai Dasar Hukum Tata Negara Di Indonesia: Implikasi Dan Implementasi” 2, no. 1 (2025): 74-82, <https://litera-academica.com/ojs/litera/>.

¹² Veronica Eka Desi Natalia, Anisa OS Pratama, and Margareta Dewi Astuti, “Implementation of Pancasila Values in Character Education: A Literature Review,” *International Journal Pedagogy of Social Studies* 6, no. 1 (2021): 35-44, <https://doi.org/10.17509/ijposs.v6i1.32569>.

3. Pengaruh Status Kewarganegaraan terhadap Pekerjaan. Warga negara Indonesia memiliki keunggulan dalam memperoleh pekerjaan formal dengan upah dan perlindungan sosial lebih baik. Penduduk asing atau individu tanpa kewarganegaraan sering terjebak di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa status kewarganegaraan memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi seseorang.
4. Pendidikan dan Kewarganegaraan. Pendidikan berkualitas lebih mudah diakses oleh warga negara. Penduduk asing sering menghadapi batasan hukum dan administratif yang membuat mereka sulit mendapat pendidikan layak. Hal ini berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan di masa depan.
5. Layanan Kesehatan dan Sosial. Warga negara punya akses lebih baik ke fasilitas kesehatan dan program sosial pemerintah. Individu tanpa kewarganegaraan sering terkendala biaya dan aturan hukum, sehingga mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan memadai. Ketimpangan ini memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat.
6. Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi sering dikaitkan dengan status kewarganegaraan. Penduduk asing dan individu tanpa kewarganegaraan sulit mengakses peluang ekonomi yang sama, termasuk pasar tenaga kerja dan dukungan pemerintah. Akibatnya muncul perbedaan pendapatan signifikan antara warga negara dan non-warga negara. Peneliti menekankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif agar semua kelompok bisa menikmati manfaat ekonomi secara adil.
7. Program Sosial. Warga negara lebih diuntungkan dalam program bantuan sosial (subsidi, tunjangan kesehatan, dan bantuan tunai). Program-program tersebut sering tidak mencakup penduduk asing, sehingga menciptakan kesenjangan dalam kualitas hidup dan ketahanan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap program pembangunan ekonomi nasional, dapat disimpulkan bahwa sebagian kebijakan pembangunan di Indonesia telah menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengurangan kesenjangan sosial. Namun demikian, masih terdapat sejumlah program yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan bangsa. Orientasi pembangunan yang terlalu berfokus pada pertumbuhan ekonomi material sering kali mengabaikan dimensi moral dan sosial yang menjadi esensi Pancasila. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahap pembangunan—mulai dari perencanaan,

implementasi, hingga evaluasi—merupakan hal yang mutlak untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun saran yang dapat disampaikan, adalah:

- a. Bagi Pemerintah, perlu dilakukan reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi agar tidak hanya menekankan pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial sesuai amanat sila kelima Pancasila.
- b. Bagi Pembuat Kebijakan, penting untuk memperkuat aspek partisipasi publik dan transparansi dalam proses perumusan serta evaluasi kebijakan agar pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat.
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti, diharapkan dapat terus mengembangkan kajian interdisipliner yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan praktik ekonomi modern, termasuk dalam konteks digitalisasi dan globalisasi.
- d. Bagi Masyarakat, perlu ditumbuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif dalam mendukung pembangunan berbasis nilai Pancasila melalui sikap gotong royong, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan ekonomi nasional tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai cita-cita Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yahya et al. "Integration of Pancasila Values in Economic Legal Engineering for National Development." *Walisongo Law Review (Walrev)* 7 no. 1, no. 1 (2025): 1-22. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22259>.
- Deliabilda, Awaliyah, Siti, Vina Marlisa, Selli, Finda Anditya, Tunggu Ariana, and Sunita Dasman. "Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila Dalam Percepatan Ekonomi Inklusif Di Era Society 5.0 (The Application of Pancasila Economic Value in Acceleration of Economic Inclusion toward Society 5.0)." *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2021): 1-20. <https://journal.lppmpelitabangsa.id/>.
- Kirti, I Gusti Ayu Subudi, Sukardi Sukardi, and Ismail Ismail. "Pengaruh Penerapan Discovery Learning Berbantuan Media Slide Program Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar PPKn." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5, no. 2 (2018): 73-83. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v5i2.60>.
- Muhamad, Ahmad, and Mustain Nasoha. "*Surel Penulis Koresponden: 1" 1, no. 2 (2024).
- Nasoha, Muhammad Mustain. "View of Dampak Kewarganegaraan Terhadap Akses Ekonomi_ Analisis Atas Kesenjangan Sosial-Ekonomi Di Indonesia (1)," n.d.
- Nasoha, Muhammad Mustain, Mohammad Fanny Amrulloh, Ahmad Tajun Nafi, Alayka Alvianto, Naufal Farid Geovani, Ahmad Muhamad, Musain

- Nasoha, and Naufal Farid Geovani. "Pancasila Sebagai Dasar Hukum Tata Negara Di Indonesia: Implikasi Dan Implementasi" 2, no. 1 (2025): 74-82. <https://litera-academica.com/ojs/litera/>.
- Natalia, Veronica Eka Desi, Anisa OS Pratama, and Margareta Dewi Astuti. "Implementation of Pancasila Values in Character Education: A Literature Review." *International Journal Pedagogy of Social Studies* 6, no. 1 (2021): 35-44. <https://doi.org/10.17509/ijposs.v6i1.32569>.
- "Pandangan Pancasila Dan Penguatan Hukum Tata Negara Dalam Era Demokrasi (1)," n.d.
- Rofatunnisa, Sifa, and Hardius Usman. "Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Ketimpangan Gender Di Indonesia: Analisis Persamaan Simultan Data Panel." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 14, no. 1 (2024): 15-32. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2530>.
- "View of Pancasila Sebagai Dasar Hukum Tata Negara Di Indonesia_ Implikasi Dan Implementasi (1)," n.d.
- "View of Pancasila Sebagai Fondasi Dalam Pembentukan Hukum Tata Negara Di Era Reformasi (1)," n.d.
- "View of Telaah Kritis Terhadap Penerapan Pancasila Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme (1)," n.d.